

LAPORAN HASIL PENELITIAN



PERAN PEREMPUAN JEPANG DALAM PERSPEKTIF GENDER

Nina Alia Ariefa, S.S., M.Si. (Ketua Peneliti)

PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

21 JULI 2020

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembahasan tentang perempuan Jepang kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dinamika peran dan status kehidupan perempuan di sepanjang sejarah Jepang, yang dimulai sejak berabad silam. Hal ini menarik untuk dibahas mengingat Jepang yang kini dikenal luas sebagai masyarakat patriarkal, sebelumnya merupakan masyarakat yang berbasis sistem kekerabatan matriarkal di masa masyarakat Jepang kuno.

Deretan nama tokoh perempuan dalam sejarah Jepang kuno juga banyak diabadikan sebagai tokoh-tokoh perempuan yang berkuasa. Dimulai dari Amaterasu¹, sang Dewi Matahari, yang muncul dalam mitologi kelahiran negeri Yamato (Jepang kuno) yang tercantum dalam dokumen *Nihongi* (日本紀, *Japanese Chronicles*)². Kemudian ada penguasa perempuan abad ke-3 di Jepang yaitu Ratu Pimiko yang terdapat dalam catatan sejarah Cina. Dalam dokumen tersebut, opini yang terbangun mengenai para perempuan adalah sebagai figur yang suci. Ketika keturunan perempuan Pimiko yang bernama Iyo menjadi ratu, ia disambut dengan banyak dukungan dari rakyat (Lu, 1997, hal. 13-14). Silva-Grondin (2010) menjelaskan bahwa yang direpresentasikan oleh Amaterasu, dipersonifikasikan dalam Pimiko dan Iyo (hal. 1). Lebra dkk (1976) menyebutkan bahwa mitologi yang berdasarkan feminitas ini menciptakan kekunoan matriarkal (*matriarchal antiquity*) di Jepang (hal. 2). Selain itu ia menegaskan, “*From the depictions of female deities in the myths and the numerous women rulers...it can be assumed that the status of women was similar to that of men.*” (Lebra, 1976, hal. 4).

Di abad ke-7 dan 8, keadaan Jepang ditandai dengan adanya perubahan sosial dan politik dan lahirnya kelas aristokrat militer baru yang diikuti oleh munculnya hak-hak istimewa yang disandang oleh kelas tersebut. Hingga akhir periode Heian, saat terjadi peperangan antar kaum

¹ Amaterasu digambarkan sebagai lambang kesempurnaan dalam agama Shinto yang menunjukkan kecerdasan, keindahan, kesuburan, dan kemurnian. Sebagai Dewi Matahari, Amaterasu adalah dewi yang utama dalam pemujaan dan kualitas kewanitaannya dianut dan dikagumi.

² *Nihongi* adalah buku tertua kedua dalam sejarah Jepang klasik. Buku ini juga disebut *Nihon Shoki* (*The Chronicles of Japan*). Buku ini lebih rumit dan rinci daripada *Kojiki*, dokumen yang tertua, dan telah terbukti menjadi alat yang penting bagi sejarawan dan arkeolog karena mencakup catatan sejarah yang masih lengkap yang paling lengkap dari Jepang kuno. Aston (1896) menjelaskan bahwa *Nihongi* selesai pada tahun 720 di bawah pengawasan editorial dari Pangeran Toneri dengan bantuan Ō no Yasumaro, dan didedikasikan untuk Permaisuri Genshō.

aristokrat militer, kedudukan perempuan bergeser sedikit demi sedikit karena perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik untuk berperang. Lambat laun status perempuan dikeluarkan dari struktur feodal dan perempuan menerima peran yang tidak penting dan hanya dianggap sebagai pelengkap kaum pria saja (Reischauer, 1982:270).

Sistem feodal di Jepang berlangsung sejak abad ke-12 hingga pertengahan abad ke-19, dengan ditandai munculnya keluarga-keluarga aristokrat militer yang memiliki kekuasaan di daerah-daerah. Pada awal masa feodal, hak waris kaum wanita atas kekayaan masih diakui dan peranan mereka dalam sistem sosial dan politik masih dapat dikenali. Namun peran dan kedudukan perempuan tersebut terus menyusut secara berkesinambungan hingga zaman Edo di abad ke-17.

Keadaan politik, sosial, dan ekonomi Jepang disinyalir turut memberikan pengaruh terhadap dinamika peran dan status perempuan Jepang di tiap zamannya. Dinamika peran dan status perempuan Jepang tersebut juga sekaligus mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Jepang dalam kehidupannya.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi sosial dari peran perempuan Jepang melalui penelusuran kehidupan perempuan Jepang, khususnya di zaman Edo hingga zaman Showa pasca Perang Dunia II.

Perumusan Masalah

Bagaimana konstruksi sosial dari peran perempuan Jepang zaman Edo hingga zaman Showa pasca Perang Dunia II?

Tinjauan Pustaka

Telah banyak upaya penelitian terhadap beragam teks untuk mengungkap penggambaran dan pengalaman perempuan Jepang di masing-masing zaman. Di antaranya adalah Shiba (1990, 1997) dan Maeda (1998) yang mengungkap gambaran beragam kasus tentang perjalanan yang dilakukan oleh perempuan zaman Edo. Penelitian mereka dilakukan melalui penelaahan terhadap catatan harian dan catatan perjalanan yang ditulis oleh perempuan zaman Edo di seluruh Jepang,

yang sangat banyak ditulis oleh perempuan kalangan awam. Penelitian Shiba mengarahkan perhatian pada kegiatan bepergian sebagai bagian dari gaya hidup perempuan zaman Edo. (Shiba, 1990, 1997). Maeda (1998) menyebut temuannya bahwa perempuan dapat melakukan perjalanan dalam kelompok untuk mengunjungi beragam tempat untuk belajar tentang tempat-tempat terkenal, seperti kuil-kuil, dan tempat-tempat pemujaan yang mereka baca dan tulis dalam puisi sangat provokatif, karena gambaran tersebut berada di luar jangkauan *Onna Daigaku* atau standar Konfusianisme, yang membatasi mobilitas perempuan di zaman Edo.

Masih melalui penelaahan tentang buku harian perempuan zaman Edo, Yabuta (1998) memfokuskan studinya pada pengungkapan pengalaman perempuan zaman Edo bernama Nishitani Saku, seorang penduduk di Kawachi (prefektur Osaka) dalam menjalani pengalaman dalam pernikahan, perceraian, dan kemudian pengalaman menikah kembali. Karena buku harian yang ditulis oleh perempuan tidak banyak, penelitiannya ini menjadi sangat berharga. Temuan buku harian perempuan Edo lainnya yang ditulis oleh ibu dan anak dari daerah Kawachi dibahas oleh Tanahashi (1999). Melalui dua penelitian ini diperoleh pemahaman mengenai isu-isu perkembangan dan pendidikan perempuan, pengalaman perempuan tentang penyakit, kemampuan literasi dan bahasa mereka, serta peran mereka dalam rumah tangga, seni pertunjukan, dan sekolah-sekolah swasta. Keduanya menunjukkan eksplorasi terhadap karakteristik fakta yang sebelumnya tidak tergambarkan mengenai kehidupan dan pengalaman perempuan Jepang di zaman Edo.

Berbeda dari penelitian di atas yang memfokuskan pada catatan harian perempuan zaman Edo, penelitian Takagi (1987, 1992), Asakura (1990), Hayami (1988), Oguchi (1995), Masuda (1990), dan Fister (1994), dan Yabuta (2000) berfokus pada penelaahan terhadap dokumen negara dan dokumen lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Jepang dalam mengungkapkan berbagai aspek mengenai kehidupan perempuan di zaman Edo.

Penelitian mengenai perempuan di zaman Showa pasca Perang Dunia II pernah dilakukan oleh Bardsley (1999, 2002), Yoshinaga (2002), Frederick (2002), Hartley (2003), Bullock (2010), Pena (2016), dan Hartley (2018) yang secara umum memfokuskan pada pembahasan mengenai representasi perempuan Jepang pasca perang, kontestasi wacana perempuan Jepang pasca Perang Dunia II, yang selanjutnya disingkat menjadi PD II, dan pandangan feminis pasca PD II melalui

penelaahan terhadap beragam media seperti esai, majalah mingguan, karya fiksi para penulis perempuan pasca PD II, debat, dan dokumen sejarah.

Ruang Lingkup

Pembahasan mengenai perempuan Jepang pada penelitian ini dibatasi ruang lingkungannya hanya pada kehidupan perempuan Jepang di zaman Edo (1604 – 1868), zaman Meiji (1868-1912), zaman Taisho (1912–1926), zaman Showa sebelum Perang Dunia II (1926–1945) dan zaman Showa pasca Perang Dunia II (1945-1989).

Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, manfaat, dan pengetahuan serta pemahaman tentang kehidupan perempuan Jepang dalam empat zaman yang berada pada rentang masa hampir empat ratus tahun serta bagaimana perempuan, menjadi bagian dari konstruksi sosial dalam kerangka gender.

Sedangkan secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kajian sejarah, kajian gender, dan kajian wilayah Jepang, serta memberikan sumbangan dalam pengaplikasiannya secara praktis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui teknik *close reading* dan metode analisis data menggunakan pendekatan gender. Telaah terhadap data sekunder berupa data sejarah mengenai zaman Edo, zaman Meiji, Taisho, zaman Showa sebelum dan sesudah Perang Dunia II dilakukan dengan teknik *close reading* atau pembacaan secara mendalam dan seksama, untuk melihat konstruksi sosial yang melingkupi perempuan Jepang di masing-masing zamannya melalui pendekatan gender. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi sosial mengenai perempuan dibangun pada masing-masing zaman tersebut, sehingga penting untuk mengungkap wacana gender sebagai konstruksi sosial yang terjadi pada masing-masing zaman.

Data dan Sumber data

Data yang telah dikumpulkan berupa data sekunder berupa pustaka mengenai kehidupan perempuan dalam konteks sejarah Jepang empat zaman, yaitu zaman Edo, zaman Meiji, zaman Taisho, zaman Showa sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

BAB II

KAJIAN DAN TELAAH TEORI

2.1 Gender

Istilah gender didefinisikan secara beragam oleh banyak peneliti. Di antaranya adalah Kessler dan McKenna (1978) yang menjelaskan gender sebagai “psychological, social, and cultural aspects of maleness and femaleness.” (hal. 7) Gender dipandang sebagai kumpulan sifat atau disposisi perilaku yang dimiliki orang berdasarkan tugas mereka pada kategori jenis kelamin tertentu. Dengan kata lain, itu mewakili karakteristik yang diambil oleh laki-laki dan perempuan saat mereka menghadapi kehidupan sosial dan budaya melalui sosialisasi. Sementara penetapan kategori jenis kelamin terjadi pertama kali saat lahir, orang terus melakukan kategorisasi sebagai laki-laki atau perempuan, satu sama lain, sepanjang hidup. Proses kategorisasi yang berkelanjutan atau atribusi ini adalah cara di mana perbedaan gender muncul dan direproduksi.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Kessler dan McKenna, Fakih (2008) dalam Puspitawati (2013, hal. 1) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultur. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Senada dengan apa yang dinyatakan Fakih, Bell dan Blaeure dalam Sari (2010, hal. 174) mendefinisikan gender sebagai harapan masyarakat mengenai pria dan wanita yang telah dikonstruksikan. Selain itu Butler (1998) dalam Perdana (2014, hal. 123) juga menyebutkan bahwa gender sengaja dibangun disesuaikan dengan budaya yang ada, bukan terjadi secara alamiah.

Istilah ini dikaitkan dengan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang disosialisasikan sejak kecil kepada dua jenis kelamin tersebut. Perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan menyangkut alat kelamin atau reproduksi dari hasil ciptaan Tuhan pada masing-

masing jenis kelamin merupakan sesuatu yang bersifat kodrati. Sedangkan perbedaan karakter, sifat, atribut yang dilekatkan pada masing-masing kelamin yang dipengaruhi oleh budaya tertentu bukanlah merupakan sifat kodrati. Sifat yang bukan merupakan sifat kodrati inilah yang oleh banyak peneliti didefinisikan sebagai gender. Dengan demikian gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, dan pembahasan tentang gender selalu terkait dengan pembedaan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat non kodrati (gender) yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil bentukan dari kebudayaan setempat, misalnya pembagian peran dan tanggung jawab yang dikenakan kepada laki-laki dan perempuan.

Menurut Puspitawati (2013: hal.2) gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

2.2 Maskulinitas dan Feminitas

Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminin. Moore (1988, 1994: 10) menyatakan gender sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Mengenai hal ini, Mosse (1996) dalam Abdullah (2003: 265) menyatakan bahwa meskipun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminin itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat.

2.3 Stereotype Gender

Gender sebagai perwujudan konstruksi sosial, mewujudkan melalui kategori peran atau perilaku orang secara kolektif, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk oleh nilai budaya dan proses yang dibangun secara sosial. Peran dan perilaku normatif tersebut berkaitan

erat dengan stereotip, yang didefinisikan oleh Lindsey (2016) sebagai konsepsi yang terlalu disederhanakan bahwa orang-orang yang menempati kelompok status yang sama memiliki kesamaan sifat tertentu yang mereka miliki. Meskipun stereotip dapat mencakup sifat-sifat positif, seringkali stereotip terdiri dari sifat-sifat negatif yang kemudian digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap anggota kelompok tertentu.

Laki-laki dan perempuan sering distereotipkan menurut ciri-ciri yang dianggap mereka miliki berdasarkan susunan biologis mereka. Penetapan stereotipe negatif dapat mengakibatkan seksisme, yaitu keyakinan bahwa status perempuan lebih rendah dari status laki-laki. Misalnya, perempuan distereotipkan sebagai orang yang bertingkah dan tidak dapat diandalkan karena mereka memiliki hormon amukan yang tidak terkendali yang memicu ledakan emosi yang tidak dapat diprediksi. Meskipun laki-laki tidak kebal terhadap konsekuensi negatif seksisme, tetapi perempuan lebih mungkin mengalaminya karena status yang mereka tempati lebih distigmatisasi daripada yang ditempati oleh laki-laki. Dibandingkan dengan pria, misalnya, perempuan lebih cenderung menempati status di dalam dan di luar rumah mereka yang dikaitkan dengan kekuasaan yang lebih rendah, prestise yang lebih rendah, atau gaji yang lebih rendah. Keyakinan tentang inferioritas karena biologi diperkuat dan kemudian digunakan untuk membenarkan diskriminasi yang ditujukan kepada perempuan. Ketika interaksi sosial lintas gender terjadi, seperti di tempat kerja, laki-laki dan perempuan cenderung tidak memiliki status dengan tingkat kekuasaan dan prestise yang sama.

Wharton menjelaskan bahwa gender mengatur identitas dan konsep diri manusia, menyusun interaksinya, dan merupakan salah satu dasar di mana kekuasaan dan sumber daya dialokasikan. Alokasi kekuasaan yang lebih dominan pada salah satu kategorisasi gender membuat kategorisasi gender tidak bersifat setara, sehingga relasi antar gender sebenarnya bersifat relasi kekuasaan karena yang satu lebih berkuasa dari pada yang lainnya. Begitu gender dikonstruksi secara sosial sebagai sesuatu yang berbeda, akan lebih mudah bagi mereka yang memiliki kekuasaan lebih (laki-laki) untuk membenarkan ketidaksetaraan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan lebih kecil (perempuan). Perbedaan sosial dibangun menjadi hak istimewa sosial (Fenstermaker dan West, 2002).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui teknik *close reading* dan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan *gender*. Telaah terhadap data sekunder berupa data sejarah mengenai perempuan di zaman Edo, zaman Meiji, Taisho, zaman Showa sebelum dan sesudah Perang Dunia II dilakukan dengan teknik *close reading* atau pembacaan secara mendalam dan seksama, untuk melihat konstruksi sosial yang melingkupi perempuan Jepang di masing-masing zamannya melalui pendekatan gender. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi sosial mengenai perempuan dibangun pada masing-masing zaman tersebut, sehingga penting untuk mengungkap wacana gender sebagai konstruksi sosial yang terjadi pada masing-masing zaman.

Langkah penelitian ini terbagi ke dalam 6 tahap, yaitu tahap 1 yang berfokus pada refleksi terhadap perempuan Jepang dalam konteks sejarah zaman Edo, tahap 2 berfokus pada refleksi terhadap perempuan Jepang dalam konteks sejarah zaman Meiji, tahap 3 yaitu refleksi terhadap perempuan Jepang dalam konteks sejarah zaman Taisho, dan tahap 4 berfokus pada refleksi terhadap perempuan Jepang dalam konteks sejarah zaman Showa sebelum Perang Dunia II, tahap 5 yaitu refleksi terhadap perempuan Jepang dalam konteks sejarah zaman Showa pasca Perang Dunia II, lalu tahap 6, sekaligus sebagai tahap terakhir, yaitu telaah konstruksi sosial dalam kerangka gender terhadap perempuan Jepang dalam empat zaman, yang sekaligus menjelaskan problematika perempuan Jepang dari masa ke masa.

BAB IV

ANALISIS

4.1 Zaman Edo

Zaman Edo yang berlangsung selama kurang lebih tiga ratus tahun dicirikan sebagai masa kepemimpinan shogun dari klan Tokugawa, dan penutupan negeri (*sakoku*), di mana Jepang menutup diri dari pengaruh negara-negara lainnya untuk menjaga stabilitas negeri. Selain itu sistem pemerintahan feodal dimapankan di periode ini, yang mencakup pemberlakuan secara ketat stratifikasi sosial atau sistem pelapisan empat kelas sosial yaitu kelas *bushi* (samurai) sebagai kelas yang tertinggi, yang disusul dengan kelas petani, lalu perajin dan terakhir yaitu pedagang. Ajaran Neo Konfusianisme, yang masuk dari daratan Cina, digunakan sebagai landasan dalam pengaturan tatanan sosial di zaman ini oleh pemerintahan Tokugawa untuk mempertahankan stabilitas kekuasaannya.

Sistem pemerintahan yang bergaya feodal menjadi kekhasan zaman Edo, yang mencakup sistem kontrol yang dilakukan melalui pemberlakuan berbagai kebijakan, untuk mengamankan kondisi sosial dan politik Jepang di bawah kepemimpinan *keshogunan* Tokugawa. Selain sistem pemerintahan yang bersifat feodalistik, kekhasan lainnya adalah menguatnya ajaran Konfusianisme yang menjadi basis ideologi di sepanjang zaman Edo. Konfusianisme mengangkat hubungan keluarga sebagai model yang tepat untuk pemerintahan. Hubungan antara orang tua dan anak dianalogikan dengan hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Berbasis keteladanan dari perilaku moral. Perbedaan kelas sosial dianggap berada dalam tatanan alami dari semesta, dan setiap kelas, setiap usia, setiap kelompok harus memenuhi kewajibannya dan mempertahankan tempat yang tepat jika masyarakat ingin menjaga harmoni.

Dua kekhasan tersebut menjadi penting untuk dicermati karena keduanya memberikan landasan sekaligus pengaruh besar, salah satunya terhadap kehidupan perempuan Jepang di zaman Edo. Kombinasi feodalisme dan ajaran Konfusianisme menempatkan perempuan pada keadaan tidak menguntungkan. Hal ini diperlihatkan melalui kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga di zaman Edo, karena praktik kepemimpinan dari laki-laki tertua yang juga

menjadi karakteristik penting dari keluarga Jepang di zaman Edo. Hubungan hierarkis dipertahankan sepanjang kehidupan keluarga untuk menanamkan rasa hormat naluriah terhadap usia anggota keluarga dan superioritas pria. Kekuasaan dan wewenang yang bersifat menentukan diberikan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, yang dipatuhi dan didukung oleh seluruh anggota keluarganya. Hal ini sekaligus memperlihatkan peran dan kedudukan perempuan di bawah kepemimpinan laki-laki dalam keluarga Jepang di zaman Edo. Hubungan kekuasaan yang tidak merata ini terlihat dalam kutipan teguran bagi perempuan dalam sebuah teks Konfusianisme abad ke-17 berjudul *Onna Daigaku (The Great Learning for Women)*:

“Itu adalah tugas utama seorang gadis yang tinggal di rumah orang tua untuk mempraktikkan kesalehan anak terhadap ayah dan ibunya. Tetapi setelah menikah, tugas utamanya adalah untuk menghormati ayah mertuanya dan ibu mertuanya untuk menghargai mereka di luar ayah dan ibunya sendiri...ia tidak boleh lalai dalam melakukan tugas apa pun yang mungkin mereka butuhkan darinya. Dengan segala hormat yang harus ia lakukan, dan tidak pernah memberontak perintah ayah mertuanya...Seorang perempuan tidak memiliki tuan tertentu. Ia harus memandang suaminya sebagai tuannya dan harus melayaninya dengan segala pemujaan dan hormat (Chamberlain, 1927: hal. 504).”

Kutipan tersebut memperlihatkan hierarki berbasis gender yang terdapat dalam keluarga di zaman Edo, sekaligus memperlihatkan bahwa posisi perempuan dalam keluarga jauh berada di bawah laki-laki, baik terhadap ayah kandungnya, suaminya, maupun ayah mertuanya. Dalam lingkup keluarga inilah peran dan kedudukan perempuan Jepang zaman Edo didefinisikan.

Secara umum kehidupan perempuan bergerak melalui fase-fase kehidupan yang berturut-turut. Dalam masing-masing fasenya terdapat hal-hal yang dipentingkan. Terdapat nilai-nilai normatif yang dikenakan pada perempuan berupa penetapan perilaku apa yang pantas atau diharapkan dalam tiap fase kehidupannya. Dengan kata lain, perilaku apa yang pantas atau diharapkan dalam satu fase kehidupan, belum tentu diharapkan di dalam fase yang lain. Kesalehan anak menjadi dipentingkan bagi anak-anak perempuan, pengembangan diri dan pernikahan dipentingkan bagi para gadis, reproduksi dipentingkan bagi para perempuan yang memasuki usia subur, membina ahli waris dan memastikan suksesti menjadi penting bagi

perempuan dewasa yang bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, dan masa pengunduran diri (pensiun) penting bagi perempuan yang telah menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab rumah tangga kepada generasi berikutnya.

Sosialisasi nilai-nilai normatif dilakukan melalui penyebaran beragam teks pedoman instruksional bagi perempuan yang berbasis ajaran neo Konfusianisme. Teks-teks pedoman ini menekankan pentingnya nilai-nilai menyeluruh seperti kepatuhan, kesalehan anak, kebijaksanaan, dan kewajiban kepada suami dan mertua. Teks-teks ini juga menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan perempuan dengan sangat terperinci, dengan fokus pada penggambaran keluarga multigenerasi di mana peran perempuan dipetakan dengan jelas juga dalam bentuk visual. Teks pedoman instruksional ini sangat berperan dalam pendidikan perempuan karena berisi tentang keterampilan praktis (rumah tangga) bagi perempuan zaman Edo, seperti menjahit dan menenun. Pendidikan bagi perempuan zaman Edo secara umum dilakukan di rumah dengan tutor yang biasanya berasal dari keluarganya sendiri, atau di *terakoya* (sekolah-sekolah kuil), yaitu lembaga pendidikan publik yang memberikan pendidikan membaca dan menulis kepada anak-anak rakyat biasa.

Selain nilai moral dan etika, persoalan pengembangan diri juga menjadi hal yang ditekankan bagi para perempuan di zaman Edo. Pengembangan diri bagi perempuan meliputi kemampuan literasi, kesantunan berbicara, penjagaan terhadap penampilan luar, dan kemahiran artistik sebagai bagian dari apresiasi terhadap budaya Jepang, seperti kegiatan apresiasi terhadap dupa (*o-ko*), merangkai bunga, atau melakukan upacara minum teh. Beberapa teks instruksional memberikan pembahasan secara terperinci tentang apresiasi terhadap dupa (*o-kō*), selain penguasaan alat musik, sebagai bagian pengembangan diri dalam pencapaian seni bagi perempuan. Penguasaan perempuan atas beragam kemampuan ini bermuara pada kebutuhan perempuan untuk membentuk kualitas diri, sekaligus sebagai upaya dalam memastikan masa depan mereka melalui peningkatan status sosial bagi diri dan keluarganya. Meskipun mobilitas sosial tidak pernah secara jelas dinyatakan sebagai tujuan dari teks-teks pengajaran untuk perempuan tersebut, namun hal itu merupakan tujuan yang jelas. Teks-teks pedoman instruksional berfungsi untuk mendorong dan memungkinkan budaya pengembangan diri dan pencapaian ini atas nama mobilitas kelas ke atas. Mobilitas dihasilkan dari hasil pernikahan yang

baik. Untuk mendapatkan pernikahan yang baik, seorang perempuan pertama-tama harus memiliki keterampilan.

Meskipun menurut beberapa pandangan struktur keluarga zaman Edo dan kebutuhan keluarga menawarkan banyak peluang bagi perempuan, namun peluang-peluang tersebut senantiasa terikat dalam suatu aturan normatif yang lebih besar yaitu ketundukannya pada kepala keluarga, yang memiliki peran tertinggi, yaitu hak prerogatif status formal, dalam unit keluarga. Wacana kekuasaan berbasis gender yang menguat di zaman Edo meninggalkan jejak yang membingkai persoalan perempuan hingga ke zaman Showa pasca Perang Dunia II.

4.2 Zaman Meiji (1868-1912)

Di masa pembukaan negeri (*kaikoku*) ini, kebijakan pemerintah Jepang berorientasi pada pengembangan negara Jepang untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat, khususnya dalam bidang teknologi dan pengetahuan, untuk menghindari imperialisme Barat. Salah satunya adalah melalui peningkatan pendidikan perempuan. Peningkatan pendidikan perempuan menjadi alat penting untuk mengelola identitas sosial perempuan untuk menyampaikan citra Jepang sebagai negara 'beradab' bagi penonton Barat.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan Jepang di zaman ini untuk dapat memperbaiki status mereka di masa depan, termasuk penentangan yang muncul dari kaum konservatif yang tetap menginginkan perempuan Jepang terikat dengan nilai-nilai dan pendidikan perempuan di masa lalu, sebelum terjadinya pembukaan negeri. Perempuan Jepang mendapati diri mereka lebih sering menjadi sasaran kebijakan langsung pemerintah karena Jepang terus menahan protes politik dan mengambil kendali yang semakin besar atas konten dan kecepatan perubahan sosial yang terjadi.

Selain itu, konflik Jepang dengan China di tahun 1894-1895 selain berdampak besar pada negara, juga berdampak pada perempuan Jepang. Ini mempercepat sejumlah kecenderungan konservatif, dan menciptakan apresiasi yang lebih besar di antara para pemimpin pemerintah tentang peran yang dapat dimainkan perempuan sebagai penghasil anak dan pendukung kebijakan nasional. Di atas segalanya, perang dan akibatnya mempertajam konflik yang sudah

tajam di antara kaum konservatif yang ingin memulihkan masa lalu dan kaum modernis yang ingin menggunakan ide-ide paling konservatif secara politik dari Barat untuk mengkonsolidasikan kontrol otoriter atas lembaga-lembaga sosial. Bagi perempuan itu adalah kombinasi yang mematikan dan pertarungan yang sangat tinggi bagi pendidikan dan kedudukan mereka dalam keluarga, yang keduanya merupakan kunci untuk perbaikan status mereka di masa depan. Perempuan Jepang mendapati diri mereka menjadi fokus kebangkitan konservatisme.

Jepang mulai mempertimbangkan peran perempuan sebagai bagian dari kekuatan dalam membangun bangsa Jepang. Peran perempuan dalam membesarkan, mendidik anak dan pendukung pasangan dipandang sebagai pembangun kebangsaan dan warga negara. Feminitas ideal dalam ideologi masa pemerintahan Meiji yang muncul di akhir abad ke-19, diringkas dalam slogan “istri yang baik, ibu yang bijak” (*ryosai kenbo*), banyak dipromosikan oleh para pemimpin pemerintahan, dan dianggap sebagai peran nasionalisme bagi perempuan, di mana perempuan Meiji memiliki bagian untuk memainkan peran dalam pembangunan bangsa. Lebih dari sekadar tugas, perempuan di masa Meiji dianggap memiliki sebuah misi.

Pendidikan perempuan memiliki fokus yang jelas pada pelatihan peran domestik, atau ekonomi rumah tangga, untuk melayani bangsa. Melalui pendidikan, negara menghasilkan istri yang baik dan ibu yang bijak (*ryosai kenbo*), yaitu “identitas yang terpolitisasi dan direproduksi oleh patriarki, yang sangat terlibat dalam pengelolaan kebangsaan, kewarganegaraan, dan nasionalisme ekonomi kapitalis” (McVeigh 2004, hal. 219).

Di masa ini laki-laki diidentifikasi sebagai warga negara melalui kapasitas produktif dan dinas militer mereka, sementara perempuan diakui sebagai warga negara atas dukungan domestik mereka untuk kegiatan-kegiatan laki-laki, dan atas kemampuan melahirkan generasi berikutnya. Istri yang baik adalah manajer rumah tangga yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang memungkinkan suami untuk terlibat lebih penuh sebagai tenaga kerja yang produktif secara ekonomi, yang memicu modernisasi yang cepat. Dengan demikian, perempuan didesak untuk berkontribusi pada negara melalui manajemen rumah tangga yang efisien, berhemat, kerja keras, dan pemeliharaan anak-anak dan orang tua.

4.3 Zaman Taisho (1912–1926)

Zaman ini ditandai dengan pecahnya Perang Dunia I yang melibatkan Jepang. Hal ini mendorong Jepang untuk mencari kekuatan baru untuk pembangunan nasional. Dari sisi pendidikan, di tahun 1920, hampir semua gadis Jepang memperoleh pendidikan wajib enam tahun, dan lebih dari 150.000 orang menghadiri sekolah tingkat menengah bagi perempuan. Hal ini mendorong kemunculan perempuan profesional pekerja kelas menengah dalam bidang pengajaran, keperawatan, posisi klerikal, pekerjaan kerah putih, dan profesi lain yang tampak jelas pada periode pasca-Perang Dunia I.

Sebagai dampak Perang Dunia I (1914-1918), perempuan mulai memiliki peran mendasar dalam sistem ekonomi sebagai unit produktif menggantikan laki-laki. Negara Jepang memandang peran gender sebagai hal yang esensial untuk pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi. Pentingnya perempuan dalam mencapai pendidikan ibu, karena negara melihat perempuan memainkan peran kunci dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Negara berinvestasi dalam pendidikan perempuan untuk memenuhi tujuan nasional, di mana perempuan mulai berbagi ruang yang sama dengan laki-laki di sekolah.

Selain itu muncul tren para perempuan yang menyuarakan keadaan mereka dan mengambil sikap dalam memperjuangkan nasibnya melalui kelompok-kelompok pergerakan perempuan, yang diawali dengan kemunculan majalah sastra perempuan Seitou (Bluestocking) di tahun 1911. Bermula dari Hiratsuka Raichou yang mendirikan majalah sastra Seitou (Bluestocking), awalnya dimaksudkan untuk menjadi media kegiatan sastra untuk perempuan, namun dengan cepat menjadi forum untuk advokasi peran sosial dan politik baru bagi perempuan. Pada 1920-an para feminis mengubah energi mereka ke arah aktivisme politik melalui organisasi-organisasi perempuan baru yang menuntut kesetaraan gender dan hak-hak politik. Gerakan ini mendapat dorongan dari perluasan kontemporer hak pilih untuk perempuan di negara-negara Barat.

4.4 Zaman Showa Sebelum PD II (1926–1945)

Destabilisasi peran gender sebelum Perang Dunia II terjadi karena wajib militer pada masa perang dan ketergantungan pada tenaga kerja perempuan dalam produksi domestik. Selama

militarisasi sebelum Perang Dunia II, negara Jepang memandang peran gender sebagai hal yang esensial untuk pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang memberi perempuan suatu peran sosial yang lebih mencolok, para elit politik mengubah pikiran mereka tentang mengecualikan perempuan dari dunia politik dan menyimpulkan bahwa mengintegrasikan perempuan dalam komunitas politik akan memperkuat negara Jepang. Oleh karena itu, ideologi gender resmi mulai berubah pada tahun 1920an. Anggota diet menegaskan bahwa perempuan harus diajari untuk menjadi “anggota negara” dan “seorang perempuan tidak bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang bijak tanpa pengetahuan politik.” Diet Jepang merevisi pasal 5 Undang-undang Kepolisian dan mengizinkan perempuan untuk menghadiri dan mensponsori pertemuan-pertemuan diskusi politik, meskipun mereka masih tidak bisa menjadi anggota partai politik. Langkah ini juga memicu tekad birokrasi untuk memobilisasi perempuan untuk tujuan negara lain yang lebih tradisional, yaitu untuk mendorong dukungan mereka dalam menyelamatkan dan berhemat, disiplin keluarga, dan pelatihan patriotik anak-anak. Kementerian Dalam Negeri membentuk organisasi perempuan di semua tingkat masyarakat, seperti yang telah dilakukan sebelumnya untuk pemuda, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada akhir tahun 1920an, para birokrat dan pemimpin partai menyetujui bahwa perempuan harus memiliki hak pilih dalam pemilihan lokal. Mereka membuat undang-undang yang akan memberi perempuan dewasa “hak sipil” untuk memilih dan memegang jabatan di pemerintah daerah. Para birokrat Kementerian Dalam Negeri meyakini, partisipasi perempuan dalam pemerintah daerah adalah logis karena “kota-kota besar, kota, dan desa pada tingkat tertentu merupakan perpanjangan dari rumah tangga ketika menyangkut sekolah, saluran air, atau toilet umum.” Pandangan Menteri Dalam Negeri diungkapkan dengan lebih cermat. “Perempuan berpikir konservatif,” katanya. “Dengan demikian akan sangat bermanfaat bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban negara dan masyarakat dengan menghalangi perubahan radikal (Garon, 1993: hal 32-33).” Agar tidak ada anggapan keliru bahwa usulan tersebut didasarkan pada kesetaraan gender, kementerian memasukkan sebuah ketentuan dalam undang-undang pemerintah yang mensyaratkan calon perempuan yang berhasil, untuk mendapatkan persetujuan suaminya sebelum menjabat. Pada tahun 1931 RUU tersebut melewati Majelis Rendah tetapi benar-benar dikalahkan di *House of Peers* yang sangat

konservatif dalam sebuah pemungutan suara dengan jumlah suara 184 melawan 62 suara. Hak pilih untuk perempuan menjadi sebuah masalah yang tidak terpecahkan sampai berakhirnya periode ini.

Terlepas dari kegagalan hak pilih sebagai cara untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam ranah politik, banyak bukti menunjukkan bahwa mobilisasi perempuan untuk tujuan negara terhitung berhasil, tidak hanya sebagai strategi mengasimilasi gerakan perempuan tetapi juga karena ada suatu pola kerja sama antara kelompok perempuan kelas menengah dan negara. Banyak organisasi perempuan kelas menengah memilih untuk bekerja dengan para birokrat dan kelompok-kelompok yang disponsori secara resmi. Seperti yang dikatakan oleh seorang sejarawan, “bagi banyak pemimpin perempuan, jalan menuju kekuasaan dan pengaruh terletak pada peran publik, seringkali ada dalam aliansi dengan negara (Garon, 1993: hal 28).” Mereka bergabung dengan birokrat untuk mendorong perempuan lain untuk memimpin dalam kegiatan publik yang tampaknya berada dalam domain khusus perempuan. Para pemimpin perempuan kelas menengah mendapatkan visibilitas di dunia politik melalui kampanye untuk meningkatkan tabungan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan dan tindakan kesehatan bagi ibu dan anak, dan sebab-sebab lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kemudian, dalam militeris tahun 1930an, bahkan feminis liberal mulai berkolaborasi dengan negara ketika kelompok-kelompok perempuan tumbuh memainkan peran penting dalam mobilisasi di masa perang, berurusan dengan masalah-masalah dari para perempuan buruh pabrik, keluarga prajurit yang meninggal, dan konservasi bahan langka.

Mulai di tahun 1940-an Kampanye Gerakan Hidup Baru (*The New Life Movement*) dilaksanakan. Kampanye ini yang merupakan kampanye sebelum perang dan di masa perang untuk meningkatkan kehidupan orang-orang kalangan biasa menjadi lebih baik. Kampanye ini berfokus pada program untuk meningkatkan moralitas, berhemat, dan efisiensi dan untuk meningkatkan kebersihan rumah tangga. Berkenaan dengan peran perempuan, gerakan ini pada umumnya berusaha merekonstruksi ideologi “istri yang baik, ibu yang bijaksana”.

4.5 Showa pasca Perang Dunia II (1945-1989)

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, terjadi okupasi atau pendudukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat di Jepang yang terjadi selama kurang lebih 7 tahun sejak tahun 1945–1952. Markas besar *Supreme Commander of the Allied Powers* (selanjutnya disingkat sebagai SCAP) merencanakan serangkaian reformasi sosial yang dirancang untuk secara mendasar mengubah kehidupan sehari-hari di Jepang, salah satunya melalui disahkannya Konstitusi 1947 menggantikan Undang-undang Meiji. Pendudukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat menggunakan sekolah formal dan pendidikan sosial untuk mengindoktrinasi publik dengan sikap dan kepercayaan yang konsisten mengenai demokrasi.

Posisi hukum perempuan diatur kembali dalam konteks wacana baru demokrasi dan hak-hak perempuan dalam keluarga Jepang ditata kembali. Diskriminasi dilarang atas dasar jenis kelamin dan pengamanatan kesetaraan gender dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga masing-masing. Anak perempuan sekarang berbagi kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Secara hukum, perempuan tidak lagi tunduk pada kehendak orang tua dalam sistem perkawinan yang diatur (*omiai*). Mereka dapat menggunakan hak penolakan dan memilih sendiri pasangan untuk diri mereka sendiri. Anak perempuan juga mendapatkan hak untuk mewarisi bagian yang sama dari harta keluarga sebagai anak laki-laki (Hane 1996, 33). Perempuan juga dapat mengajukan perceraian dan mendapatkan hak pilih. Selain itu, penghapusan sistem *ie* (sistem keluarga tradisional Jepang) terjadi periode ini.

Meskipun melalui konstitusi tahun 1947 perempuan terlihat diuntungkan secara sosial dan ekonomi, bagaimanapun, banyak perempuan menemukan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi mereka tidak membaik, atau berubah sangat lambat (Hane 1996, 150). Selain itu, kesetaraan gender yang dijamin pada konstitusi yang baru tersebut lebih hanya bersifat di atas kertas daripada dilakukan dalam praktiknya.

Peningkatan masa wajib belajar menjadi sembilan tahun yang terjadi di masa ini dan pembukaan universitas nasional mengubah secara dramatis kehidupan sehari-hari anak sekolah Jepang secara umum, khususnya anak perempuan. Agenda pendidikan yang disengaja ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menumbuhkan ibu rumah tangga yang layak pada periode awal pascaperang. Modernisasi pada periode ini ditandai oleh perubahan peran gender yang berarti bahwa sebagian besar perempuan yang sudah menikah mengambil peran sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Peran sentral yang diberikan kepada perempuan Jepang pascaperang

melalui peran ibu rumah tangga profesional bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tangga dan dukungan penuh terhadap suami sebagai bagian dalam angkatan kerja Jepang.

Pada 1950-an, peran istri telah menjadi pusat produksi kapitalis pascaperang, karena keluarga dikonseptualisasikan kembali sebagai lokus kegiatan konsumen, dan rumah sebagai ruang untuk memberi energi kembali pada tenaga kerja (Ohinata 1995, hal. 203; Borovoy 2005, hal. 84). Dengan demikian, ibu rumah tangga menjadi semacam wakil manajer, yang secara profesional mengatur periode pergantian di mana seorang pekerja (yang digambarkan sebagai laki-laki) tiba di rumah, diisi ulang, beristirahat, dan berangkat lagi untuk hari berikutnya ke tempat kerja. Wacana publik juga menekankan pentingnya 'menghasilkan tenaga kerja esok' di rumah.

Pada tahun 1960-an muncul kelas menengah baru di Jepang, yang melambangkan 'kehidupan baru yang cerah' (*akarui seikatsu*) dengan tipe keluarga standar, yaitu seorang suami yang bergaji, seorang ibu rumah tangga penuh waktu, dan (dua) anak-anak mereka. Proses standarisasi keluarga Jepang ditandai dengan pembentukan pembagian peran yang sangat spesifik dan kaku, melalui pembentukan dan profesionalisasi peran ibu rumah tangga penuh waktu. Sosiolog keluarga Jepang terkemuka, Ochiai Emiko (1996, 2005), menggunakan istilah *shufuka* (*housewifization*) untuk merujuk pada proses di mana peran ideal untuk perempuan Jepang menjadi ibu rumah tangga penuh waktu yang profesional ini. Vogel menjelaskan bahwa ibu rumah tangga yang berpendidikan juga memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga profesional (*sengyo shufu*), yaitu karier seumur hidup yang penuh waktu, di mana ia diharapkan untuk berkomitmen dengan kesetiaan yang sama (1978, hal.17).

Selama tahun 1950-an dan hingga awal 1960-an, terdapat peran Gerakan Hidup Baru (*The New Life Movement*) dalam menaturalisasi peran gender sebagai bagian dari ekonomi politik pemulihan dan pertumbuhan negara Jepang. Masyarakat di Jepang pascaperang telah menjadi masyarakat yang berpusat pada perusahaan (*kigyo shakai*), sebagai dampak dari kekuatan sektor korporasi yang menjadi lebih luas. Kampanye Gerakan Hidup Baru yang sebenarnya merupakan inkarnasi gerakan yang muncul sebelum PD II, menjadi gerakan komprehensif. Gerakan ini melibatkan perusahaan secara langsung dalam memprofesionalkan ibu rumah tangga melalui kuliah umum, kursus, majalah dan buletin perusahaan, dan kegiatan lainnya, sebagai bagian dari upaya umum untuk merasionalisasi ekonomi dan meningkatkan

produktivitas. Selain itu, gerakan ini dilakukan secara cerdas dengan cara perusahaan memberi tahu perempuan apa yang harus dilakukan, atau menjadi apa mereka seharusnya, dan secara bersamaan, menawarkan pada mereka kemungkinan untuk berpartisipasi dalam menentukan peran manajer dalam rumah tangga modern.

Suksesnya Gerakan Hidup Baru sebagai proyek korporat yang luas dan energik terbukti dengan mapannya peran ibu rumah tangga penuh waktu di akhir 1960-an, dan banyak gadis muda Jepang belajar ekonomi rumah tangga di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan program vokasi (*junior college*). Keberhasilan Gerakan Hidup Baru dalam mendidik perempuan Jepang untuk menjadi ibu rumah tangga yang modern, ilmiah, dan lebih efisien merupakan hasil kolaborasi kekuatan besar korporasi Jepang atau kemunculan masyarakat yang berpusat pada perusahaan, keterlibatan asosiasi perempuan dan ibu rumah tangga secara besar-besaran dalam merespons kampanye Gerakan Hidup Baru.

Tingkat hegemoni di mana gagasan bahwa seorang perempuan yang menikah harus menjadi seorang ibu rumah tangga telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa pada tahun-tahun pembentukan pasca Perang Dunia II. Hal ini dilihat berdasarkan dari fakta bahwa di tahun 1950-an, sebagian besar perempuan yang menikah dengan pekerja kerah biru atau kerah putih adalah ibu rumah tangga penuh waktu (Gordon, 2005, hal. 443), dan dari tingkat “profesionalisasi” peran ibu rumah tangga yang telah tercapai di akhir 1960-an (Vogel, 1978).

Menempatkan ibu rumah tangga Jepang dalam struktur sosial dan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II sangat penting, tidak hanya untuk memahami berbagai kekuatan politik dan sosial yang telah mempromosikan dan mereproduksi sosok ibu rumah tangga di sepanjang sejarah Jepang modern, tetapi juga untuk memahami kekuatan ibu rumah tangga sebagai suatu peran gender yang terbukti dengan sendirinya dalam kehidupan perempuan Jepang.

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan refleksi terhadap peran perempuan Jepang mulai zaman Edo hingga zaman Showa pasca Perang Dunia II, terlihat bahwa ada pemertahanan peran yang sama bagi perempuan Jepang oleh negara Jepang, yaitu pada ranah domestik. Pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak-anak selalu menjadi bagian dari kehidupan kerja perempuan Jepang. Dengan kata lain, domestikasi terhadap perempuan terus berlanjut dan dipertahankan dari masa ke masa.

Perempuan di zaman Edo memiliki peran sebagai pendukung keberlangsungan keluarga melalui kemampuannya untuk melahirkan keturunan, dan pendukung kesejahteraan keluarga salah satunya membantu keluarganya untuk naik dalam kelas sosial melalui pernikahan dengan keluarga yang potensial. Pendidikan dalam rangka pengembangan diri perempuan dapat membantu perempuan meningkatkan daya tariknya sebagai pasangan potensial. Melalui pernikahan yang menguntungkan, perempuan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi keluarganya. Seorang perempuan di zaman Edo dapat memenuhi perannya dan mengekspresikan moralitasnya dengan berbagai cara. Dalam kaitannya dengan upaya ini, perempuan sepenuhnya terintegrasi dan keberadaannya sangat diperlukan, tidak hanya untuk kemampuan reproduksi mereka, namun juga melalui bakatnya dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi keluarganya demi kesejahteraan keluarga. Di bawah sistem patriarki yang diterapkan secara ketat di zaman ini, meskipun perempuan Jepang dianggap dapat mendulang kekuasaan seiring dengan meningkatnya usia mereka di dalam keluarga sebagai anggota keluarga senior, namun sejatinya perempuan tetap tidak memiliki status formal dengan hak prerogatif seperti laki-laki. Sistem patriarki mengunci posisi perempuan di bawah kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang yang signifikan dalam struktur keluarga tradisional Jepang.

Hal yang serupa juga terjadi pada perempuan Jepang di zaman Meiji. Jika di masa Edo perempuan memainkan peranan dalam peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga, maka perempuan Jepang di zaman Meiji memiliki bagian untuk memainkan peran dalam pembangunan bangsa Jepang, pasca pembukaan negara Jepang di tahun 1868. Lebih dari sekadar tugas, perempuan di masa Meiji memiliki sebuah misi. Peran perempuan dikembangkan salah

satunya dalam perannya sebagai ibu dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya, suatu peran yang tidak ditekankan pada peran perempuan di zaman Edo. Pendidikan perempuan di zaman Meiji memiliki fokus yang jelas pada pelatihan peran domestik, atau yang disebut sebagai ekonomi rumah tangga untuk melayani bangsa. Peningkatan persentase anak perempuan usia sekolah yang menerima pendidikan dasar meningkat dari 43,9% menjadi 98,8% antara tahun 1895 dan 1920 seiring dengan diberlakukannya pendidikan dasar wajib bagi perempuan. Peningkatan pesat dalam pendidikan perempuan menginspirasi debat publik yang kontroversial tentang kurikulum yang paling sesuai untuk istri dan ibu di masa depan, dan peran sosial yang disetujui untuk perempuan, yaitu melalui slogan *ryousai kenbo* (istri yang baik dan ibu yang bijaksana) yang didengungkan oleh pemerintah Meiji. Propaganda ini memperlihatkan bahwa domestikasi terhadap perempuan masih terus berlanjut setelah zaman Edo berakhir, dan peran perempuan di zaman Meiji kembali diletakkan sebagai pendukung dalam mencapai tujuan negara yaitu pembangunan nasional Jepang. Penguasa di zaman Meiji menggunakan pendidikan sosial untuk tujuan mempromosikan inovasi dan perubahan sambil mempertahankan struktur dan nilai-nilai sosial tradisional.

Booming pendidikan perempuan yang dimulai di zaman Meiji hingga zaman Taisho menjadi katalisator untuk perluasan peran sipil perempuan di kemudian hari selama periode antar perang (1918–1939), dan munculnya organisasi-organisasi perempuan baru yang mengejar hak-hak politik selama periode demokratisasi Jepang yang singkat antara tahun 1912 dan 1926. Selain itu, selama periode antar perang, transfer informasi dan pengetahuan kepada perempuan adalah inti dari kampanye negara Jepang untuk mempromosikan rasionalitas dan efisiensi dalam kehidupan publik dan pribadi sehingga sumber daya dapat disalurkan ke modernisasi yang cepat, mobilisasi militer, dan perluasan kekaisaran di luar negeri. Ikatan asosiasi perempuan adalah sumber daya untuk program manajemen sosial birokrat dari Departemen Pendidikan, yang juga menyelenggarakan serangkaian kuliah umum dan pameran yang menargetkan peserta perempuan, yang kemudian berbagi informasi ini dengan keluarga, teman, dan tetangga mereka. Banyak aktivis perempuan melihat kolaborasi dengan negara sebagai kesempatan untuk membentuk peran publik baru untuk ‘istri yang baik dan ibu yang bijaksana’. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa penempatan dan pemertahanan peran perempuan dalam ruang-ruang rumah tangga tetap terjadi di zaman Taisho.

Pasca Perang Dunia II, pembagian peran berbasis gender terlihat dalam program peng-ibu-rumah-tangga-an (*housewifization*) terhadap perempuan Jepang pada masa ini. Peng-ibu-rumah-tangga-an adalah proses di mana modernisasi dan industrialisasi yang terjadi di Barat dan Jepang meningkatkan pemisahan antara ruang domestik dan publik. Modernisasi ditandai oleh perubahan peran gender yang berarti bahwa sebagian besar perempuan yang sudah menikah mengambil peran sebagai pembantu rumah tangga penuh waktu. Negara Jepang, dalam keterkaitannya yang erat dengan sistem ketenagakerjaan Jepang, melahirkan model pencari nafkah laki-laki, yang menurutnya laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, domestikasi perempuan masih terus dilakukan di periode pasca Perang Dunia II ini. Perempuan diposisikan dalam perannya dalam rumah tangga, sebuah ruang yang sama yang terus menerus disediakan bagi perempuan Jepang dalam kurun waktu kurang hampir empat abad sejak zaman Edo di abad ke-17.

Eksistensi perempuan Jepang dari zaman Edo hingga zaman Showa pasca Perang Dunia II banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang dibangun melalui kebijakan-kebijakan negara. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan dominan di masing-masing zaman menjadi kekuatan yang berada di balik terciptanya konstruksi sosial mengenai perempuan Jepang. Kebijakan negara terus memperkuat perbedaan sosial dan biologis antara perempuan dan laki-laki. Model sosial ideal ini telah disyaratkan untuk pembangunan nasional dan masih tetap sebagai cara melihat peran gender di Jepang.

Peran negara yang terpenting adalah untuk mendorong terwujudnya pembagian peran gender yang jelas, serta melakukan normalisasi atas pembagian kerja berdasarkan gender tersebut. Penggunaan berbagai strategi, di antaranya melalui sistem pendidikan, penyebarluasan pedoman bagi perempuan, slogan, serta rintisan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti kerjasama dengan organisasi perempuan, korporasi, dan lain-lain terus digencarkan negara demi langgengnya pembagian peran berbasis gender di masyarakat Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardsley, J. (1999). Discourse on women in postwar Japan: The housewife debate of 1955. *U.S.-Japan Women's Journal*. English Supplement, 16, 3-47.
- Bardsley, J. (2002). Women for a new Japan: Sex, love, and politics in the early postwar. *U.S.-Japan Women's Journal*. English Supplement, 23, 2-9.
- Bullock, J. C. (2010). Party crashers and poison pens: Women writers in the age of high economic growth. In *The other women's lib*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Chamberlain, B. H. (1927). *Things Japanese*. London: K. Paul, Trench, Trubner.
- Fister, P. (1994). *Kinsei no joryu gakatachi* (Early Modern Women Artists). Kyoto: Shibunkaku.
- Frederick, S. (2002). Women of the setting sun and men from the moon: Yoshiya Nobuko's "ataka family" as postwar romance. *U.S.-Japan Women's Journal*. English Supplement, 23, 10-38.
- Garon, S. (1993). Women's groups and the Japanese state: Contending approaches to political integration, 1890–1945. *Journal of Japanese Studies* 19 (1): 5–41.
- Gordon, A. 2005. Managing the Japanese household: The new life movement in postwar Japan. In Barbara Molony and Kathleen Uno (Ed.) *Gendering modern Japanese history*, 421–60. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
- Hane, M. (1996). *Eastern phoenix: Japan since 1945*. Oxford: Westview Press.
- Hartley, B. (2003). *Writing the body of the mother: Narrative moments in Tsushima Yuko, Ariyoshi Sawako and Enchi Fumiko*. *Japanese Studies*, 23(3), 293-305. DOI: 10.1080/1037139032000156360
- Hartley, B. (2018). Feminist acts of reading: Ariyoshi Sawako, Sono Ayako, and the lived experience of women in Japan. In Julia C. Bullock, Ayako Kano, & James Welker (Ed.). *Rethinking Japanese feminisms*. University of Hawai'i Press. URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv3zp07j.16>
- Hayami, A. (1988). *Edo no nomin seikatsu shi* (Life of the Edo Agricultural Population). NHK shuppan.
- Lebra, J.C. (1991). Women in an all-male industry: The case of sake brewer Tatsu'uma Kiyō. In Bernstein, G. L. (Ed.). *Recreating Japanese Women, 1600-1945*. Berkeley: Univ of California Press.
- Maeda, Y. (1998). *Edojidai joryu bungei shi; Tabi nikki hen (history of Edo-period women's literature: Travel diaries)*. Kazama shobo.

- Masuda, Y. (1990). *Yoshino Michi no shogai* (The life of Yoshino Michi). In *Edojidai no joseitachi* (Edo-period women). Kinsei Jyoseishi Kenkyukai (Society for the Study of Edo-period Women, Ed.). Yoshikawa Kobunkan.
- McVeigh, B.J. (2004). *Nationalism of Japan: Managing and Mystifying Identity*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Ochiai, E. (1996). *The Japanese family system in transition: A sociological analysis of family change in postwar Japan*. Tokyo: LTCB International Library Foundation.
- Ochiai, E. (2005). *Sekai no naka no sengo Nihon kazoku, Nihonshi kōza* 10: 159-96.
- Oguchi, Y. (1995). *Josei no iru kinsei* (The early modern of women). Keiso shobo.
- Ohinata, M. (1995). The mystique of motherhood: A key to understanding social change and family problems in Japan. In Kumiko Fujimura-Fanselow and Atsuko Kameda (Ed.) *Japanese women: New feminist perspectives on the past, present and future*, 199–212. New York: The Feminist Press at the City University of New York.
- Pena, J. (2016). *Japanese women's fight for equal rights: Feminism and the US occupation of Japan, 1945 – 1952*. CUNY Academic Works.
- Reischauer, E. O. (1982). *Manusia Jepang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Shiba, K. (1990). *Tabi nikki kara mita kinsei josei no ichi kosatsu* (Early modern women viewed through travel diaries). In *Edojidai no josei tachi* (Early modern women), Kinsei jyoseishi kenkyukai (Society for the Study of Edo-period Women). Yoshikawa kobunkan.
- Shiba, K. (1997). *Kinsei onna tabi nikki* (Early modern women's travel diaries). Yoshikawa kobunkan.
- Silva-Grondin, M. A. (2010). *Women in ancient Japan: from matriarchal antiquity to acquiescent confinement*. *Inquiries Journal*, 2(09).
- Takagi, T. (1987). *Mikudari han to enkiri tera* (Notes of Divorce and Divorce Temples). Kodansha.
- Takagi, T. (1992). *Mikudari han* (Notes-of-Divorce Letters). Heibonsha.
- Tanahashi, K. (1999). *Kusa no ne no haijin to sono nettowāku* (Grassroots Poets and their Networks). *Josei shigaku* 9.
- Yabuta, Y. (2000). *Rediscovering women in Tokugawa Japan*. (No. 2000-2002). Harvard University, Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies.
- Yabuta, Y. (1998). *Otoko to onna no kinseishi* (Men and women in early modern Japan). Aoki shoten.

Yoshinaga, S. (2002). Masculinist identifications with "woman": Gender politics in postwar Japanese literary debates. *U.S.-Japan Women's Journal*. English Supplement, 22, 32-63